



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 24 September 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sebanyak 20 (dua puluh) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun Eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 24 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
 NOMOR : 41 TAHUN 2025
 TANGGAL : 24 September 2025
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Produk hukum yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD tahun berkenaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atas hasil persetujuan DPRD	√	-		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Wajib
2	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Produk hukum yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD tahun berkenaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atas hasil persetujuan DPRD		√		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III	Wajib
3	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Produk hukum yang terdiri atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD tahun berkenaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atas hasil persetujuan DPRD	√	-		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Wajib
4	Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh aktivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan mencakup Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Triwulan II	Propempera Tahun 2025
5	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Badan Pendapatan Daerah	Triwulan III	Propempera Tahun 2026
6	Peraturan Daerah	Rumrah Susun	Pembinaan, Perencanaan, Pembangunan, Penguasaan permilikan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Peningkatan Kualitas, Pengendalian, Kelembagaan, Tugas dan wewenang, Hak dan Kewajiban, Pendanaan/ sistem pembiayaan dan Peran Serta Masyarakat sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumrah Susun di DKI Jakarta	√	-	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan II	Propempera Tahun 2025

7	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Menimbang Mengingat BAB I Ketentuan Umum BAB II JENIS SPAM BAB III PENYELENGGARAAN SPAM BAB IV PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB VI PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN BAB VIII PEMBIAYAAN, TARIF, RETRIBUSI DAN IURAN SPAM BAB IX PERIZINAN BAB X KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SPAM BAB XI DATA DAN SISTEM INFORMASI SPAM BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV LARANGAN BAB XV PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	✓	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Dinas Sumber Daya Air	Triwulan II	Propemperda Tahun 2025
8	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah	Mengatur mengenai: 1) data kesehatan; 2) upaya kesehatan, 3) penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di DKI Jakarta 4) Kriteria, Penerima Program Bantuan Iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan 5) Pemberian Bantuan Khusus Bagi Warga DKI Jakarta yang tidak mengakses Jaminan Kesehatan karena belum terdaftar/keanggotaannya di non aktifkan 6) Pemberian Bantuan Khusus bagi warga Jakarta yang tidak dicover oleh layanan BPJS Kesehatan. 7) Pengaturan anggaran kesehatan daerah, sistem KJS 8) Pengaturan layanan kesehatan sesuai program Universal Health Coverage (UHC) dan antispasimunculnya pandemi, endemi serta, penyakit-penyakit menular	-	✓	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.	Dinas Kesehatan	Triwulan III	Propemperda Tahun 2025
9	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta	✓	-	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Biro Hukum	Triwulan II	Propemperda Tahun 2025

10	Peraturan Daerah	Pengelolaan dan Penguasaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Pengaturan penambahan persyaratan bagi pendatang yang tinggal di DKI Jakarta 2) Penerbitan KK baru karena pisah KK dilakukan maksimal 3 (tiga) KK dalam satu alamat 3) Pengaturan kewenangan pemberian hak akses database mirror SIAK 4) Pengaturan penonaktifan NIK sementara bagi penduduk yang secara de facto tidak bertempat tinggal di DKI	√	-	Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Triwulan II	Propemperda Tahun 2025
11	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta Tahun 2026-2046	Perencanaan pembangunan industri prioritas di Provinsi DKI Jakarta untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.	√	-	UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Triwulan II	Baru
12	Peraturan Daerah	Facilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Prov DKI Jakarta	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Facilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Triwulan III	Baru
13	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Pangan	1) Perencanaan Pangan Daerah 2) Penyediaan Pangan 3) Pendistribusian Pangan 4) Pemanfaatan Pangan 5) Pencegahan dan Pengurangan Pangan Berlebih 6) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Rawan Pangan 7) Pengembangan Sumber Daya Manusia 8) Penelitian dan Pengembangan Pangan 9) Sistem Informasi Pangan dan Gizi 10) Peran Serta Masyarakat 11) Kelembagaan Pangan 12) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 13) Pembiayaan	√	-	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Triwulan II	Baru

14	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan	<p>Mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hak Perempuan Korban 2) Kewajiban pemerintah daerah 3) Pengembangan sistem data dan informasi 4) Partisipasi masyarakat 5) Penghargaan kepada lembaga yang menyelenggarakan perlindungan Perempuan 6) Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi terhadap Perempuan 7) Pelayanan 8) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 9) Koordinasi dan Kerja Sama 10) Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan 11) Pembiayaan 	√	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Triwulan IV	Baru
15	Peraturan Daerah	Pembangunan Keluarga	<p>Mengatur ruang lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fungsi dan tanggung jawab keluarga dalam pelaksanaan delapan fungsi keluarga 2) meningkatkan kualitas keluarga melalui Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 	√	-	<p>Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</p>	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Triwulan IV	Baru

16	Peraturan Daerah	Pengendalian Penduduk	Mengatur ruang lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengaturan pengendalian penduduk untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	√	-	Dampak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Dinas Pemberdayaan, Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Triwulan IV	Baru
17	Peraturan Daerah	Kabupaten/Kota Layak Anak	Dasar bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak . a. Menguralkan tahapan yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak b. Menguralkan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak dalam penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak	√	-	1. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan, Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Triwulan IV	Baru
18	Peraturan Daerah	Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Mengatur tentang Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	√	-	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	Triwulan III	Baru
19	Peraturan Daerah	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup c. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	√	-	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan II	Baru
20	Peraturan Daerah	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	√	-	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Triwulan III	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KERTUA,


DPRs. H. KHOIRUDIN, M.Si